

KERTAS POSISI INDONESIA

INDUSTRIALISASI DARI BAWAH

SENTUL, BOGOR 1-3 JULI 2025



Tim penulis

Olisias Gultom - Hints

Rachmi Hertanti - Transnational Institute.

M Alwi Kurniawan - Kesatuan Perjuangan Rakyat

Muslim Silaen - Hints.

Panitia Seminar

KPR, KASBI, SMI, SEMPRO, KSN, PWYP, dan
Sembada

Undangan seminar

KPRI, SPRI, PS, TUK Indonesia, RAG, dan INFID

Narasumber Seminar

Iwan Nurdin - KPA

M Ridha - PB Kompolnas

Suraya Afiff - Dosen Fisip UI



INDEX

Pendahuluan	iv
Pandangan Bersama Untuk Agenda Pembangunan Ekonomi Dari Bawah	
Kebutuhan industrialisasi	6
Transformasi Ekonomi Berkeadilan Sosial	8
Kedaulatan Rakyat dalam Pembangunan	11
Industri Kerakyatan	13



PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi global sedang mengalami perubahan mulai dari sumber energi, teknologi hingga komoditi ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi krisis iklim. Akan tetapi dalam implementasinya tetap memiliki sisi hegemoni dari kekuatan politik global yang menggunakan isu energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari dominasi strategis. Kedudukan negara global-selatan masih berperan sebagai penyedia bahan baku dan tenaga kerja murah. Keuntungan masih didapatkan oleh kapital-kapital yang besar dari negara-negara global utara. Kepentingan ini kembali melanggengkan bentuk kolonialisme di negara selatan untuk memastikan dominasi pembangunan ekonomi hijau negara utara atau disebut sebagai bentuk kolonialisme hijau. Ketergantungan struktural masih menjadi masalah utama di bidang geoekonomi dan geopolitik.

Merespon kompleksitas situasi tersebut diatas, Pemerintah Indonesia mendorong agenda penghiliran industri berbasis sumber daya alam (SDA seperti mineral, pertanian, perkebunan, dan kelautan, akan sebagai prioritas kebijakan pembangunan ekonominya dengan membangun industri pengolahan yang menghasilkan produk bernilai tambah. Pemerintah mengklaim bahwa hilirisasi dilakukan untuk menjawab persoalan ketergantungan ekonomi Indonesia akibat mengandalkan komoditas sumber daya alam mentah sebagai basis pendulang devisa. Tidak berkembangnya produksi nasional menyebabkan Indonesia bergantung pada impor dan rentan terhadap krisis ekonomi global. Ketergantungan ini semakin diperburuk oleh liberalisasi perdagangan dan investasi, termasuk utang luar negeri.

Program hilirisasi ini diklaim oleh pemerintah sebagai salah satu tambahan pendapatan negara yang mampu mengatasi problema ekonomi nasional. Salah satu target hilirisasi adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Klaimnya, Indonesia berpotensi



DOK FOTO : SENTUL, BOGOR 1-3 JULI 2025

menghadapi ancaman peningkatan angka pengangguran dan masuk ke dalam 'Jebakan pendapatan kelas menengah' (**middle income trap**). Situasi ini terjadi akibat efek **de-industrialisasi** sehingga pertumbuhan ekonomi nasional stagnan karena tidak ditopang oleh sector ekonomi produktif. Namun, pertanyaannya kemudian apakah hilirisasi untuk transformasi ekonomi nasional akan benar-benar terjadi secara berkeadilan sosial? dan bagaimana konsep industrialisasi atau Pembangunan ekonomi dari bawah yang mendorong terjadinya transformasi berkeadilan bagi rakyat?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Gerakan Buruh Indonesia membuat sebuah simposium nasional soal industri hijau pada 1-3 juli 2025 di Sentul, Jawa Barat. Kegiatan simposium ini bertujuan mengembangkan pengetahuan bersama gerakan rakyat atas perkembangan geoekonomi dan geopolitik, membahas dan mendokumentasikan perhatian gerakan rakyat atas situasi geoekonomi dan geopolitik, dan terakhir mencari alternatif yang tersedia bagi gerakan rakyat untuk bisa mengambil peran dalam politik industry, khususnya di Tengah tren transisi hijau.

Selama tiga hari, kegiatan ini diharapkan dapat mengundang organisasi lintas sektor dan isu untuk memperoleh masukan terutama atas konsep dasar Industrialisasi, Dekolonialisasi, Transisi energi dan regionalisme alternatif. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membuat sebuah dokumen yang menguraikan Pembangunan alternatif sebagai agenda aksi bersama.

PANDANGAN BERSAMA UNTUK AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI DARI BAWAH

A. KEBUTUHAN INDUSTRIALISASI

Situasi geopolitik dan geoekonomi global telah memberikan dampak pada pendalaman ketergantungan ekonomi Indonesia, termasuk pada situasi perekonomian nasional yang tidak dapat lagi bertahan dari model pembangunan ekonomi yang menggantungkan hanya pada ekspor bahan mentah dan pertumbuhan konsumsi tanpa sektor produksi yang kuat. Pada akhirnya, situasi ini juga berdampak signifikan pada sektor makro ekonomi dan fiskal yang Kembali menggantungkan Indonesia pada model pembiayaan utang.

Namun, situasi ini tidak bisa dilepaskan dari proses Pembangunan ekonomi Indonesia dari masa ke masa sejak colonial hingga saat ini. Paska jaman colonial (Jaman kemerdekaan dan demokrasi terpimpin), Pembangunan diarahkan pada project dekolonisasi dan fokus pada pembangunan industrialisasi berat yang direncanakan negara (*state-led heavy industrialization*) untuk mencapai 'ekonomi berdikari'.

Kebijakan utamanya Adalah nasionalisasi aset asing dari pemerintah colonial Belanda dan perusahaan Inggris; Menyusun Rencana Pembangunan Semesta Berencana (RPSB); dan membangun industrialisasi pada industri dasar dan strategis seperti baja, semen, pupuk, tekstil, kertas, pesawat terbang - lewat IPTN, kapal laut. Pelaku industry juga diarahkan pada peran BUMN. Akan tetapi, krisis politik tahun 1965, ketika beralihnya dari pemerintahan Soekarno ke Pemerintahan Suharto,

telah mendorong perubahan mendasar dengan melahirkan model ekonomi dan industri berpandangan 'Pembangunanisme' dengan ketergantungan Modal Asing yang tinggi serta lebih membuka pada penerapan konsep kapitalisme. Pelaku ekonomi beralih dari BUMN kepada pihak swasta yang mendapatkan dukungan besar dari negara sehingga memunculkan konglomerasi-konglomerasi. Bahkan, di era reformasi paska krisis ekonomi 1997 dan guncangan politik Indonesia, model Pembangunan ekonomi Kembali mendorong pergeseran menuju kearah kebijakan ekonomi yang sangat neoliberal, yang mendorong pendalaman reformasi demokrasi liberal, deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi.

Agenda ini diartikan untuk memindahkan industry luar ke Indonesia (dibaca Industrialisasi di Indonesia) yang difasilitasi dengan kebijakan-kebijakan neoliberal, dan bukan dalam konteks industrialisasi Indonesia yang secara bangunan konsep dan strategi benar-benar disusun atas dasar kebutuhan fundamental dan mendasar Indonesia sebagai suatu bangsa.

Desakan agenda privatisasi sektor publik penting oleh Bank Dunia dan IMF pada tahun 1998 juga mendesak privatisasi BUMN yang memungkinkan masuknya kepemilikan saham swasta dalam usaha negara di sektor-sektor publik penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Model ini Kembali membuka ruang penguatan pasar dalam struktur perekonomian negara dan mengembalikan aktivitas perekonomian kepada sektor swasta. Tentunya, hal ini membuka ruang untuk kembali mempertanyakan secara kritis tentang pengelolaan BUMN atas penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, dengan karakter pelaku usaha domestic dibawah control konglomerasi yang berkarakter sebagai pemburu rente Pembangunan ekonomi menjadi rentan dan tidak tercipta seorang industriawan dari dalam negeri. Pilihan terhadap sektor ekstraktif dan berorientasi ekspor demi mendulang keuntungan berlipat-lipat telah memberikan dampak fundamental terhadap Pembangunan ekonomi di dalam negeri. Gejala ***de-industrialisasi premature*** di Indonesia menjadi buktinya.

Situasi ini semakin memperparah situasi bonus demografi yang berujung pada beban demografi dimana ruang hidup dengan angkatan kerja semakin sempit. Jumlah demografi menuntut industrialisasi yang mampu menyerap keadaan saat ini dengan menciptakan lapangan kerja. Dalam implementasi ini dibutuhkan pembangunan industri bersifat prioritas selain juga revitalisasi industri strategis.

Lebih lanjut, situasi geopolitik dan geoekonomi global menjadi ruang pertarungan Pembangunan industrialisasi dimana negara industry maju Kembali mendorong penyesuaian sepihak (unilateral adjustment) terhadap standar aturan global untuk melanggengkan praktek ekonomi kolonial, khususnya dalam ruang perebutan sumber daya alam (pertanian, mineral, energi).

Akan tetapi, situasi geopolitik global yang sedang mengarah dunia multipolar harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari tekanan kolonial. Dekolonisasi standar aturan global perlu dilakukan dengan membangun model kerjasama tatanan ekonomi Selatan-Selatan yang baru. Dan ini juga perlu diikuti dengan pembangunan berbasis pada proses demokratisasi rakyat dari bawah dalam mendorong agenda pembangunan berbasis pada kedaulatan ekonomi rakyat, baik dalam konteks kontrol terhadap kepemilikan, model produksi dan ekstraksi, distribusi, dan konsumsi.

B. TRANSFORMASI EKONOMI BERKEADILAN SOSIAL

Agenda Hilirisasi Indonesia masih dikuasai dan menguntungkan kepentingan oligarki yang kembali menjadi subordinasi system kapitalisme global. Hilirisasi yang diletakkan pada mekanisme pasar dengan model dan hubungan produksi yang anarkis serta ekstraksi berlebih tentu bukanlah pilihan dan hanya akan memperdalam daya rusak bumi dan semakin melegitimasi kegagalan sistem yang ada. Hal ini berpotensi untuk dikooptasi oleh kepentingan korporasi besar yang berusaha melanggengkan relasi kuasa yang ada terkait dengan konsentrasi kekuatan hegemonik yang melekat pada aspek kepemilikan, monopoli terhadap akses ke sumber energi dan bahan baku, termasuk kontrol terhadap teknologi penting yang dibutuhkan dalam transisi energi.

Kekuasaan negara yang Kapitalistik telah melahirkan kebijakan hilirisasi yang direncanakan secara tidak demokratis. Sejak proses pembuatan hingga manfaatnya bukan untuk kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Bahkan, lahirnya UU Cipta kerja (**Omnibus Law**) dibentuk tanpa partisipasi publik secara nyata dan hanya memfasilitasi kepentingan bisnis elit dan oligarki yang menjadi kepanjangan tangan perusahaan-perusahaan multinasional dengan mempermudah perizinan investasi, tidak hanya dalam konteks kemudahan izin usaha, tetapi juga izin untuk mendapatkan akses kepada lahan, sumber daya alam, termasuk memastikan aturan tenaga kerja dapat menekan biaya produksi. Pembuatan kebijakan berasaskan sistem politik demokrasi liberal dan prosedural menyingkirkan aspirasi rakyat terutama kaum

buruh. Pada pembentukan UU Cipta Kerja, keterlibatan organisasi rakyat kerap hanya bagi kelompok pro pemerintah dan tidak bagi pada kelompok masyarakat yang kritis. Hal ini telah berdampak pada kerusakan lingkungan, ketenagakerjaan, perlindungan HAM, Perempuan-anak-disabilitas, dan standar kemanusiaan lainnya. Bahkan, dalam pelaksanaan kebijakan hilirisasi industry sumber daya alam Indonesia, kami telah mencatat dampak-dampak yang ditimbulkan, yaitu:

DAMPAK TERHADAP EKOLOGI	SOSIAL-EKONOMI
<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan (hilirisasi nikel, sawit, PLTU). • Degradasi tanah (monopoli bibit, pupuk kapitalistik). 	<ul style="list-style-type: none"> • Industrialisasi berbasis Ekstraktif, Deindustrialisasi. • Upah buruh rendah Fleksibilitas tenaga kerja (prekariat, PHK) • Swastanisasi listrik (dominasi korporasi). • Kapasitas ekonomi dan industri hanya di UMKM. • Buruh perempuan (cuti haid/ melahirkan ditolak). • Hilirisasi nikel rugikan buruh perempuan. • PLTU dominasi swasta. • Batu bara ekspor (bukan untuk PLN).



Oleh karena itu, tujuan pembangunan ekonomi dan industri Indonesia diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan rakyat dan tidak terjebak pada praktek komodifikasi yang menyengsarakan rakyat. Komodifikasi disadari sebagai praktek yang memanipulasi keterdesakan ekonomi dan kerakusan individual dalam bentuk pelayanan yang seharusnya menjadi bentuk pelayanan terhadap rakyat atas kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini maka reorientasi kebijakan industry harus didasari oleh prioritas pembangunan yang terencana secara demokratis. Pada akhirnya, hal ini akan membuka ruang bagi negara untuk mengatur pembatasan terhadap ekstraksi sumber daya alam yang dibutuhkan untuk Pembangunan industry yang terencana secara demokratis.

Tentunya, hal ini mensyaratkan kehadiran negara yang benar-benar demokratis dan seutuhnya menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan mandat kedaulatan rakyat. Pengelolaan negara atas sumber daya alam juga menjadi isu kunci dalam memaknai kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Hal ini penting untuk mengkritisi peran dominan dari aktor korporasi multinasional swasta dalam agenda hilirisasi industri.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDUSTRIALISASI NASIONAL

Menentukan industri turunan sesuai pemetaan sektor prioritas dan strategis

Konsolidasi dan tata kelola BUMN pada sektor prioritas

Integrasi industri lokal di pedesaan ke dalam sistem rantai pasok (*supply chain*)

Mengadopsi kesepakatan internasional terkait perlindungan HAM, hak perburuhan, keadilan gender, masyarakat adat, dan kelestarian lingkungan ke dalam regulasi industri

Bentuk-bentuk kepemilikan saham yang menguntungkan buruh dan rakyat di area industri

Memastikan penegakan hukum yang ketat

Insentif bagi industri yang memenuhi capaian/target industri

Membentuk kelembagaan pengawas industrialisasi



C. KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMBANGUNAN

Pembangunan industri dengan kepemimpinan negara dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam pelaksanaannya masih memiliki masalah berkaitan dengan bisnis prioritas oligarki. Ini juga melihat pengusaha yang sekaligus menjadi politikus tidak berhasil meningkatkan kapasitas industri domestik. Malahan pengusaha nasional yang selama ini beraktifitas pada industri olahan sekarang masuk kembali ke industri ekstraktif terutama tambang. Pelaksanaan ekonomi berbasis industri menjadi kritik terutama pada peran pengusaha nasional dalam memengaruhi sekaligus memanfaatkan kebijakan industrialisasi nasional untuk kepentingan bisnisnya.

Bahkan, nasionalisme telah dikooptasi oleh elit yang membentuk kelas nasional antara kapitalis dan tekno-birokrat dalam mempertahankan rezim kebijakan ekonomi liberalnya. Pasal 33 ayat 3 UUD RI menjadi legitimasi penguasaan Negara atas Sumber daya alam untuk Kembali menguatkan praktek praktek perburuan rente oleh kepentingan oligarki, yang juga diperburuk dengan agenda privatisasi BUMN di Indonesia. Padahal, makna "Penguasaan oleh Negara" di dalam pasal 33 ayat 3 UUD RI tersebut merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat, baik dalam konteks demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi, dimana rakyat diakui sebagai sumber, pemilik, dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi itu mencakup juga makna kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Pasal 33 ayat (3) UUD RI juga menjadi dasar bagaimana peran negara dalam Pembangunan menjadi kunci dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di dalam Pembangunan untuk membatasi peran dominan actor korporasi dimana kemakmuran Masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang sebagaimana yang ditetapkan oleh Mohammad Hatta. Inilah mengapa Konstitusi Indonesia bernafas sosialistik daripada kapitalistik. Untuk itu, dalam mewujudkan demokratisasi dan kontrol public dalam Pembangunan ekonomi dan arah industrialisasi Indonesia harus mengembalikan makna kedaulatan rakyat dalam penguasaan sumber daya alam oleh negara di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI yang dapat menjadi dasar dalam menetapkan beberapa aspek perencanaan dan penyusunan regulasi Pembangunan seperti:

1. Penetapan sektor strategis dan prioritas Pembangunan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2. Pengaturan dan penetapan peran BUMN dalam pengelolaan sektor strategis dan prioritas

3. Pembatasan ekstraksi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
4. Penetapan ukuran kemakmuran rakyat dari Pembangunan ekonomi dan industry strategis atas pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara
5. Perumusan mekanisme kontrol publik yang demokratis

PERAN PUBLIK: HARUS KOLEKTIF, BUKAN ELITIS

A. Publik Sebagai Perencana

Rakyat harus punya suara dalam arah pembangunan industri, bukan diserahkan ke teknokrat atau korporasi. Keterlibatan terlibat mesti dilembagakan, dan didukung untuk berada dengan posisi tawar yang kuat untuk menandingi kekuatan Pasar dan Negara

- Penentuan industri apa di kawasan tertentu, didasarkan pada kebutuhan objektif rakyat
- Di samping ekspor, tujuan produksi yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan rakyat

B. Publik Sebagai Produsen, Sekaligus Penerima Manfaat

Selain membuka lapangan pekerjaan, industrialisasi mesti bermuara pada

- Kedaulatan teknologi;
- Kepemilikan atas hasil industri;
- Kredistribusi nilai tambah kepada rakyat, bukan segelintir pemegang saham.

PENGELOLAAN BUMN: DARI KORPORASI ELITIS KE DEMOKRASI EKONOMI

BUMN dewasa ini mencirikan orientasi pada profit, dikendalikan elit politik atau direksi profesional, dan jauh dari pengawasan rakyat. Solusinya: Demokratisasi BUMN → Menempatkan rakyat dalam fungsi perencanaan dan pengawasan bermakna, bukan hanya negara dalam arti sempit. Caranya sebagai berikut:

- Dewan pengawas BUMN yang melibatkan perwakilan serikat pekerja, koperasi, masyarakat lokal, dan komunitas akademik.
- Laporan keuangan dan operasional dibuka untuk publik (transparansi menyeluruh).
- Sebagian laba dikembalikan ke masyarakat lewat dividen sosial, bukan hanya ke negara sebagai pemegang saham.
- Pembedaan rekening keluar masuk BUMN > tracking pendanaan
- Pengawasan multi layer > BPK, KPK, dll

D. INDUSTRI KERAKYATAN

Industrialisasi di Indonesia masih berkerangka orientasi pasar. Sejak industrialisasi era kolonial hingga masa setelah reformasi, pembangunan industri dilihat pada kebutuhan komoditi laku di pasaran untuk diekspor. Corak ini menghilangkan potensi Pembangunan yang muncul dari daerah-daerah potensial dan dikelola oleh Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kerangka ini membuat pembangunan industri oleh negara belum bisa menghubungkan industri desa dengan industri besar. Bahkan, kegagalan terbesar dari Pembangunan model ini Adalah terjadinya reforma agraria sebagai landasan utama dalam mendorong Pembangunan yang mengutamakan pada actor di pedesaan.

Kelanjutan dari pemenuhan ini memerlukan prinsip pembangunan dan industrialisasi sebagai ekonomi kerakyatan dengan dasar-dasar seperti; Prinsip industri kerakyatan yang diawali untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan melakukan produksi secara kolektif dan meluas. Pembangunan model ini membutuhkan redistribusi kekayaan dengan diawali oleh Reforma agraria. Reforma agraria untuk menyelesaikan masalah struktural di agraria terutama di pedesaan. Sehingga transformasi dari masyarakat agraris ke industri tidak melompat dan menyebabkan masalah sosial. Produktivitas pertanian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dan penyiapan modal di pedesaan. Industrialisasi muncul sebagai usaha meningkatkan produktivitas masyarakat agraris di pedesaan. Industrialisasi di tingkatan ini pasti masih kecil, sehingga membutuhkan tenaga kerja terampil, teknologi dan kapasitas lainnya. Ini juga akan mendorong industrialisasi komunitas jadi embrio industrialisasi pedesaan berbasis lokal. Setelah masalah agraria diatasi, maka diharapkan ada daya dukung industrialisasi di kota atau kawasan ekonomi khusus.

Pembangunan industry kerakyatan juga perlu menysar pada konsep pengembangan dan pengkualitasan sumber daya manusia lokal. Sehingga, perlindungan buruh dalam agenda hilirisasi di bawah kontrol rakyat harus menghapuskan Sistem kerja kontrak, outsourcing Bahkan magang. Sebab dengan sistem kerja tersebut para buruh rentan kehilangan pekerjaannya. Hal lainnya, tenaga kerja lokal harus memiliki kemampuan menjalankan teknologi hilirisasi serta mendominasi penguasaan teknologi tersebut. Hal ini perlu diwujudkan melalui Sistem Pendidikan yang dilaksanakan sebagai pemenuhan tujuan pencerdasan kehidupan bangsa yang diarahkan pada pemenuhan pengetahuan dan keterampilan yang terarah dan terhubung bagi pembangunan industri yang berkeadilan sosial

PRASYARAT

- Reforma agraria
- Pembangunan industri dasar milik negara
- Memetakan sektor prioritas (industri dasar: baja, minyak, listrik, energi; pertanian, maritim) dan sektor strategis (ketahanan, pendidikan, kesehatan, pangan)
- Mendorong industri lokal dengan dukungan modal, teknologi, skill, pasar, dll.
- Penguatan Research and Development, Pendidikan, Vokasi
- Reformasi sektor keuangan

EKONOMI ALTERNATIF

Industri nasional berbasis kerakyatan yang kuat, mandiri, berkelanjutan, dari hulu sampai hilir :

- Koperasi di basis buruh
- Penguatan distribusi berbasis buruh dan petani
- Pengoptimalisasian sektor UMKM
- Koperasi, pembangunan jaringan ekonomi (buruh-petani) dan pembangunan ekonomi sirkular
- Pengoptimalisasian dan percepatan transisi energi (fosil ke energi terbarukan) berbasis komunitas dan atau desa
- Integrasi petani dan pekerja sektor pangan
- Optimalisasi sektor pariwisata dan produk usaha local
- Optimalisasi sector ekonomi di tingkat desa





PUBLISH WHAT YOU PAY

